



TAJUK

Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Harus Jadi Program Prioritas

Persoalan sampah di Kota Jogja belum juga kelar hingga kini. Sejumlah depo sampah yang sebelumnya sudah berhasil dikosongkan kini kembali membeludak.

Sampah di depo yang menggunung belum terserap maksimal oleh sejumlah tempat pengolahan sampah.

Guna mengatasi masalah itu, Pemkot Jogja menyatakan bakal membuang sampah-sampah itu ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dan unit pengolahan sampah (UPS).

Khusus di UPS, Pemkot Jogja mendaku bisa mengolah hingga sekitar 200 ton sampah. Adapun penumpukan sampah diklaim dikarenakan mesin untuk mengelola sampah di ITF Bawuran Bantul belum optimal.

Selama ini sampah yang telah dikelola di ITF Bawuran baru sekitar 10 ton per hari. Sementara pengelola ITF Bawuran menargetkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah hingga mendekati batas maksimal 50 ton per hari.

Bertolak dari persoalan sampah yang masih terjadi sampai sekarang, program pemerintah membangun sejumlah fasilitas pengolahan sampah harus segera direalisasikan dan menjadi program prioritas.

Belum lama ini pemerintah mewacanakan program pemanfaatan sampah untuk energi. Program ini semestinya segera dijalankan dengan serius. Apalagi Jogja digadang-gadang jadi *pilot project* pemanfaatan sampah untuk energi, kalau regulasi atau Keputusan Presiden (Keppres) mengenai hal tersebut sudah terbit.

Pemerintah tidak bisa lagi menunda-nunda rencana penambahan fasilitas pengolahan sampah. Apalagi DIY sangat rawan terjadi ledakan sampah karena daerah ini adalah tujuan wisata. Setiap momen liburan, volume sampah di berbagai daerah sering kali meningkat.

Agenda membereskan masalah sampah sejak dari tingkat rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir harus dikawal betul dan dipastikan berjalan. Bahkan, bila perlu terbitkan aturan beserta sanksinya untuk memastikan mekanisme pengelolaan sampah betul-betul berjalan sejak dari tingkat rumah tangga.

Kerja sama lintas daerah, serta antara provinsi dan daerah sangat penting untuk menyelesaikan masalah sampah di DIY. Aturan memang menyatakan persoalan sampah menjadi urusan pemerintah daerah, namun demikian, pemerintah provinsi tidak bisa lepas tangan begitu saja. Pemda DIY harus mendukung penuh upaya pengolahan sampah di wilayahnya.

Pemda DIY juga harus lebih aktif menagih Pemerintah Pusat merealisasikan rencana investasi pengolahan sampah menjadi energi dengan dana dari Danantara. Bagaimanapun investasi di bidang ini butuh biaya tak sedikit. Termasuk memastikan ketersediaan lahan untuk menampung fasilitas pengolahan sampah.

Selama ini, lahan sering menjadi kendala investasi. Pemerintah harus aktif meyakinkan masyarakat terkait pembangunan fasilitas pengolahan sampah, serta memastikan pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak bagi warga yang tinggal di sekitar tempat pengolahan sampah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005